

KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Oleh : Hero Suprayetno

Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

Abstrak :

Besarnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari dana perimbangan, pajak daerah, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, seperti hasil penjualan barang-barang milik daerah, jasa giro, sumbangan pihak ketiga, angsuran/cicilan rumah dinas atau kendaraan bermotor, kontribusi penyertaan modal pada pihak ketiga, serta bunga deposito. Salah satu sumber pajak daerah yang potensinya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak kendaraan bermotor pada awalnya merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 1957 jo peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1959. Atas dasar penyerahan tersebut maka urusannya menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi melalui Dinas Pendapatan Propinsi, dimana kegiatan operasionalnya, dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Propinsi di setiap Kabupaten / Kota.

Kata Kunci : Kontribusi, Pendapatan

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang dilaksanakan di Kalimantan Timur sejak tahun 2001, membawa konsekuensi yang cukup besar bagi pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota maupun masyarakat luas. Bagi pemerintah daerah, implementasi kebijakan ini menuntut perubahan mendasar di berbagai aspek, mulai keharusan untuk melakukan restrukturisasi organisasi, pola manajemen pembangunan, perilaku birokrasi, sumber dana untuk kegiatan

pembangunan dan pemerintahan serta mempersiapkan sumber daya manusia sebagai pelaksananya. Sementara bagi masyarakat yang selama ini hanya menjadi obyek pasif dari pembangunan harus ditingkatkan peranannya agar dapat menjadi subyek pembangunan dan ikut serta menentukan jalannya proses pembangunan di daerah.

Pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut merupakan kesempatan daerah untuk menumbuhkembangkan segala potensinya, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai kreatifitas usaha. Fenomena ini dapat dilihat dari naiknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan pendapatan ini merupakan pengaruh langsung dari bertambahnya beberapa komponen sumber pendapatan daerah yaitu dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Sebelum diserahkan jenis pajak ini ke daerah maka semua penerimaan kedua jenis pajak ini adalah merupakan penerimaan pusat dan daerah tidak mendapatkan bagian sedikitpun meskipun obyek pajaknya berada di daerah. Dengan diserahkan kedua jenis pajak ini ke daerah, maka semua penerimaan menjadi milik daerah dan dari hasil pajak tersebut dapat dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan di daerah.

A. Perumusan Masalah

Sebelum penulis melanjutkan pada rumusan masalah, terlebih dahulu penulis akan mengutip beberapa pendapat para ahli tentang pengertian masalah.

Masalah menurut Sugiyono (2001 : 35) masalah dapat diartikan sebagai: "Penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi". Rumusan masalah yang baik menurut Tuckman yang dikutip oleh Sugiyono (2001:36) adalah: "Yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya atau alternatif yang secara implisit mengandung pertanyaan."

Menurut Winarno Surachmat (1999:3) masalah adalah: "Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui apabila akan berjalan terus."

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (2000:71) masalah adalah: Kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan bagaimana seseorang. Dengan demikian perumusan masalah adalah pertanyaan tentang kenapa ... mencari penyebab atau independent variable. Apa

yang terjadi ... faktor akibat atau dependent variable.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah "**Bagaimanakah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (pada Kantor UPT Dipenda Propinsi Kaltim, Kutai/Samsat) memberikan Kontribusi Untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 1999/2000 s/d 2003.**"

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui profil Kantor UPT Dipenda Propinsi Kaltim, Kutai/Samsat.
2. Untuk mengetahui besarnya realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor UPT Dipenda Propinsi Kaltim, Kutai/Samsat pada tahun 1999/2000 s/d 2003.
3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 1999/2000 s/d 2003.
4. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

C. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu informasi dan bahan pertimbangan bagi Kepala Kantor UPT Dipenda Propinsi Kaltim, Kutai/Samsat dalam menetapkan suatu kebijaksanaan pada periode yang akan datang.
2. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unika Tenggarong.

3. Sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pajak Kendaraan Bermotor / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang berarti merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pajak daerah menurut Mardiasmo (2002) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah sebagian sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai pendapatan yang menjadi kewenangan hasil usaha sendiri sebagai konsekuensi logis dari penyelenggaraan tugas desentralisasi. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengurus pengelolaan jenis-jenis sumber dana yang masuk dalam pendapatan asli daerah, agar dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas desentralisasi.

Berdasarkan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tertentu atau tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah, pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Pinjaman Daerah
- 4) Lain-lain Penerimaan yang sah

D. Kerangka Pikir

Untuk mengetahui berapa besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah diperlukan adanya suatu mekanisme pungutan pajak melalui alur pikir sebagai berikut :

- Wajib pajak menyetor pajak yang terhutang ke kasir Samsat yang sebelumnya telah ditetapkan oleh petugas penetapan dan seterusnya disetor kepada Bendaharawan Khusus Penerima BBNKB/PKB untuk menyetorkan pada Kas Daerah Propinsi yang ada pada Bank Pembangunan Daerah dimasing-masing daerah Kabupaten/Kota dengan menyampaikan laporan kepada UPTD dimana Samsat berada. Selanjutnya realisasi penerimaan PKB/BBNKB tersebut dilaporkan oleh masing-masing UPTD ke Kantor Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur dengan melampirkan bukti setor ke kas daerah. Kas daerah dalam menerima setoran PKB/BBNKB mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah setempat.

Setelah Dinas Pendapatan Propinsi menerima realisasi penerimaan PKB/BBNKB tersebut, selanjutnya menyusun realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari berbagai komponen penerimaan termasuk PKB dan BBNKB tersebut.

METODE PENELITIAN

Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Kaltim UPT Dispenda Propinsi Kaltim, Kutai/Samsat Jl. Cut Nyak Dien Tenggarong, dengan didasari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Undang-undang nomor 18 tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

A. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data di lapangan, penulis menggunakan metode atau tehnik pengumpulan sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), Yaitu dengan cara mempelajari literatur, buku-buku ilmiah, laporan-laporan dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (*fieldwork research*), Yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan tehnik-tehnik sebagai berikut :
 - a. *Interview*, yaitu dengan jalan mengadakan tanya jawab secara lisan kepada pegawai yang menjadi obyek dalam penelitian ini.
 - b. *Dokumenter* yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari arsip-arsip penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ada.

B. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2004:90) mengatakan bahwa populasi adalah “Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.” Sedangkan sampel adalah (Sugiyono, 2004:91) adalah : “Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Kantor UPT Dispenda Propinsi Kaltim, Kutai/Samsat yang berjumlah 23 orang. Sedangkan sampel yang diambil sebanyak 2 orang atau lebih sesuai kebutuhan data penelitian. Tehnik yang digunakan dalam penentuan anggota sampel adalah tehnik *non probability sampling* dengan cara *sampling purposive* atau *snowball sampling*. Dalam penelitian kualitatif tehnik sampling yang paling banyak digunakan adalah *purposive* dan *snowball*.

C. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa peneliti ingin memperoleh deskripsi atau gambaran mengenai apakah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur Kutai Kartanegara

Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur Kutai Kartanegara di Tenggarong didirikan pada Bulan Nopember 1978. Pada awalnya kantor ini berstatus sebagai Kantor Pembantu Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai, pada bulan Juli 1979 status Pembantu Cabang berubah menjadi Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD, status Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur ini berubah lagi menjadi UPT Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur Kutai Kartanegara.

2. Struktur Organisasi UPT Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur Kutai Kartanegara

B. Upaya yang Dilakukan UPT Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur Kutai Kartanegara Untuk Meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian Otonomi Daerah kepada Kabupaten atau

Kota memegang peranan yang penting terutama di sektor Pendapatan Daerah. Sedangkan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Upaya intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan melalui kegiatan baik mencakup aspek kelembagaannya, aspek penatalaksanaannya maupun aspek personalianya. Sedangkan upaya ekstensifikasi (menggali sumber-sumber PAD yang baru) masih dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan produk nasional dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Pada dasarnya Administrasi Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah sudah tercermin dalam APBD dan sudah melaksanakan beberapa fungsi antara lain : fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitas. Sedangkan untuk pengeluaran keuangannya, peran daerah terbagi pada beberapa satuan yang terpisah dan salah satunya Dinas Pendapatan Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan bertugas memungut berbagai pajak, retribusi dan pajak daerah serta hasil perusahaan milik daerah, baik dari segi jumlah maupun dari jenis penerimaan. Dinas Pendapatan Daerah juga bertugas pada koordinator kegiatan memantau dan melaporkan semua penerimaan daerah.

C. Hasil Penelitian

1. Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, diketahui bahwa kondisi penerimaan dari sektor pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi peningkatan tersebut bukan berarti hasil

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan secara optimal. Karena didalam melaksanakan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut terkadang bisa saja mendapat hambatan baik dari faktor internal maupun eksternal. Peningkatan penerimaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini dapat saja lebih secara optimal dan selalu mencapai target yang di inginkan apabila di dalam pelaksanaan pemungutannya di dukung oleh faktor-faktor internal dan eksternal

2. Target dan Realisasi Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada dasarnya adalah pajak yang tidak terpisahkan dari pajak Kendaraan Bermotor, karena melekat menjadi satu. Artinya setiap kegiatan atau transaksi jual beli kendaraan bermotor, maka dengan sendiri terjadi transaksi pembayaran atas Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil realisasi pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengalami kenaikan yang signifikan. Secara de facto jumlah penerimaan tersebut masih dapat di tingkatkan lebih besar. karena belum seluruhnya potensi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat tergalikan dan masih terdapat celah-celah yang dapat di pungut.

Faktor-faktor Yang Mendukung Perolehan Pungutan Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Secara Internal dan Eksternal, faktor-faktor dari lingkungan strategis sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors*). Faktor-faktor dari dalam yang dapat dipandang sebagai

pendorong upaya peningkatan PKB/BBNKB di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagaimana dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

1. Identifikasi Faktor-faktor Internal

Setiap organisasi memiliki aset yang disebut faktor internal antara lain, modal, sumber daya manusia, pengetahuan dan bahan baku seperti yang ada pada UPT Dispenda wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

- a) Adanya Peraturan Daerah Tentang Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan penagihan;
- b) Tersedianya wajib Pajak diberbagai sektor usaha;
- c) Tersedianya Tenaga khusus untuk turun ke lapangan (setiap wilayah);
- d) Adanya Sumber Dana DAU untuk mendukung program peningkatan PAD;
- e) Kuantitas sumber daya manusia yang memadai;
- f) Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal;
- g) Koordinasi yang baik dengan mitra kerja lain dalam hal intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan;
- h) UPTD di daerah yang potensial akan memudahkan pelaksanaan operasional dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat;
- i) Tersedianya dana operasional yang memadai;
- j) Adanya intensif yang memadai yang akan memacu kreativitas bawahan.

2. Identifikasi faktor-faktor Eksternal

Mengingat kondisi di sekitar yang selalu berubah adanya perubahan dan lingkungan bisnis yang semakin kompleks, maka faktor eksternal yang dihadapi pada UPT Dinas Pendapatan

Daerah Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- a) Banyaknya potensi obyek pajak atau retribusi dengan semakin mudahnya membuka usaha;
- b) Terbukanya peluang berinvestasi bagi PMA, PMDN dan berbagai sektor (pertanian, perkebunan, pertambangan, perusahaan kayu dan lain-lain).
- c) Undang-Undang No.22 tahun 1999 dan undang-undang nNo.25 tahun 1999, yang telah direvisi menjadi UU Nomor 32 & Nomor 33 Tahun 2004, yang memberikan wewenang lebih luas kepada daerah untuk mengelola daerahnya, sehingga akan melahirkan sumber-sumber penerimaan baru yang selama ini dikuasai oleh pemerintah pusat;
- d) Undang-Undang No.4 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah ;
- e) Peraturan Pemerintah no.65 tahun 2000 tentang pajak daerah dan peraturan pemerintah no.66 tahun 2000 tentang retribusi daerah;
- f) SK Gubernur Kalimantan Timur No.3 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas yang memberikan mandat dan wewenang yang jelas kepada dispenda untuk berkiprah lebih maksimal;
- g) Kondusifnya stabilitas keamanan di Kalimantan Timur;
- h) Membaiknya kondisi perekonomian Kalimantan Timur yang menyebabkan adanya potensi kenaikan penerimaan dari pajak, retribusi maupun pendapatan lain-lain;
- i) Dukungan masyarakat yang tinggi akan peraturan daerah yang diberlakukan;
- j) Kecenderungan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Timur;

Faktor-faktor yang Menghambat Perolehan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Adapun faktor-faktor yang dapat dipandang sebagai faktor penghambat upaya meningkatkan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, baik dari sumber internal maupun eksternal adalah sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Faktor-faktor internal

Beberapa faktor penghambat yang bersumber dari dalam organisasi adalah :

- a. Belum tersedianya data profesional obyek pajak secara riil dan akurat;
- b. Terbatasnya keterampilan tenaga teknis di lapangan baik kualitas maupun kuantitas (belum memadai);
- c. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan;
- d. Belum optimalnya tertib administrasi;
- e. Belum optimalnya pengendalian intern;
- f. Transportasi kurang lancar;
- g. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai;
- h. Sistem pengawasan lalu lintas keuangan yang masih lemah sehingga akan memudahkan adanya kerugian keuangan daerah;
- i. Belum optimal tergalinya sumber-sumber penerimaan baru yang potensial;
- j. Sarana dan prasarana yang belum memadai di UPTD sehingga menyulitkan pelayanan kepada masyarakat.
- k. Data analisa proyeksi PAD masih belum sepenuhnya dikerjakan secara elektronik.

2. Faktor-faktor eksternal

Mengingat kondisi di sekitar yang selalu berubah, adanya perubahan dan lingkungan bisnis yang semakin kompleks, maka faktor eksternal yang dihadapi UPT Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara yang dapat dipandang sebagai faktor penghambat adalah:

- a. Letak geografis daerah yang sulit;
- b. Kurangnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi perpajakan;
- c. Sarana transportasi yang kurang;
- d. Situasi politik yang tidak menentu membuat investor menjadi ragu;

Pengelolaan dana perimbangan sektor sumber daya alam masih tergantung pada pemerintah pusat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penyajian dan analisis data yang disajikan dalam Bab IV Skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagaimana berikut ini.

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perolahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan Kontribusi dari sumber Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) antara lain dengan memasukkan hal tersebut ke dalam Rencana Starategis (Renstra) Dinas Pendapatan Propinsi dan Renstra UPT Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur, Kutai KartaNegara. Upaya tersebut meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan antara lain melalui : (a) meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia aparatur UPT Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara sehingga mampu bekerja

secara maksimal; (b) memperbaiki prosedur dan mekanisme yang berkenaan dengan pemungutan, penerapan pajak, sehingga memudahkan wajib pajak. Adapun kebijakan yang dikeluarkan sebagai upaya untuk meningkatkan PAD secara umum, maupun PKB/BBNKB adalah:

- a. Pemberian kesempatan yang adil bagi semua pegawai untuk mengikuti pendidikan dan diklat merit sistem;
 - b. Membangun dukungan masyarakat akan pentingnya pemenuhan kewajiban pajak melalui kerja sama dengan masyarakat maupun mitra kerja;
 - c. Penambahan UPTD baru untuk mengembangkan daerah potensial;
 - d. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara optimal;
 - e. Pemanfaatan sistem pelayanan;
 - f. Pengembangan sektor pelayanan;
2. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai pembagian hasil antara pemerintah Propinsi dan kabupaten / Kota pada tahun 1999 / 2000 PKB / BBNKB belum memberikan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah Undang-undang Nomor : 34 tahun 2000 tersebut berlaku, barulah PKB / BBNKB memberikan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2000 16,43%; tahun 2001 24,05%; tahun 2002 47,55% dan tahun 2003 30,88%. Sedangkan secara parsial Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 1999/2000 belum ada, pada tahun 2000 sebesar 5,98%; tahun 2001

sebesar 7,25%; tahun 2002 sebesar 13,35%; dan pada tahun 2003 sebesar 9,32%. Sedangkan kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 1999/2000 belum ada, pada tahun 2000 sebesar 10,45%; tahun 2001 sebesar 16,81%; tahun 2002 sebesar 34,21%, dan tahun 2003 sebesar 21,56%. (selengkapnya lihat tabel 7,8,9). Kalau kita lihat pada tahun 2003 terjadi penurunan persentase kontribusi dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya peningkatan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup tinggi, tetapi bukan berarti itu penurunan dalam jumlah angkanya.

3. Adapun hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat memberikan sumbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasilnya dapat dikontribusikan untuk kepentingan daerah diantaranya untuk membiayai sarana dan prasarana umum, pengembangan sektor pelayanan, pengembangan dan peningkatan pendidikan secara pelatihan sumber daya manusia;
4. Faktor yang mendorong upaya peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara adalah :
 - a. Adanya Peraturan Daerah Tentang Pungutan Pajak Daerah Sebagai dasar hukum pelaksanaan penagihan;
 - b. Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal;
 - c. Koordinasi yang baik dengan mitra kerja lain dalam hal intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan;
- d. Tersedianya dan operasional yang memadai;
- e. Luasnya obyek/subjek pajak yang belum digali;
- f. Undang-undang no. 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah no.65 tahun 2000 sebagai dasar acuan untuk pungutan pajak;
- g. Membaiknya kondisi perekonomian Kalimantan Timur yang menyebabkan adanya potensi kenaikan penerimaan pajak, retribusi maupun pendapatan lain-lain;
- h. Kecenderungan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Timur khususnya di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Faktor internal yang menghambat upaya peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kutai Kartanegara adalah:
 - a. Belum tersedianya data profesi obyek pajak secara riil dan akurat;
 - b. Terbatasnya keterampilan tenaga teknis di lapangan baik kualitas maupun kuantitas (belum memadai);
 - c. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perpajakan;
 - d. Belum optimalnya tertib administrasi;
 - e. Terbatasnya sarana transportasi untuk operasional;
 - f. Luasnya obyek/subyek;
 - g. Letak Geografis daerah yang sulit;
 - h. Kurangnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi perpajakan;

B. Saran-saran

Dari kesimpulan tersebut, peneliti dapat mengajukan saran sebagai rekomendasi sebagai berikut :

1. Prasarana dan sarana yang diperlukan oleh pemungut dan penagih pajak harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Propinsi dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga para personil dapat meningkatkan kinerjanya tanpa hambatan di lapangan.
2. Diperlukan sosialisasi yang terus menerus terhadap wajib pajak, baik perseorangan maupun perusahaan, dengan memperjelas mekanisme pembayaran pajak dan dengan memberikan pelayanan prima kepada mereka, sehingga kesadaran membayar pajak dapat ditingkatkan.
3. Perlu perhatian khusus terhadap kendaraan yang berasal dari luar Daerah dan beroperasi di Kalimantan Timur khususnya dalam hal ini di Kutai Kartanegara, sehingga Pemerintah Kota tidak dirugikan karena terdatanya kendaraan tersebut.
4. Melakukan pengawasan secara langsung ke obyek/subjek pajak PKB dan BBNKB dan menjalin kerjasama antar aparat pelaksana di lingkungan Samsat.
5. Untuk menunjang kelancaran pungutan pajak PKB dan BBNKB di UPT Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara perlu melakukan penambahan peralatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
6. Untuk keefektifan pungutan PKB dan BBNKB dapat dilakukan di tingkat kecamatan, yaitu membuka UPT Pembantu (Samsat pembantu) di tingkat Kecamatan dan lembaga

tersebut sekaligus berfungsi mengawasi semua kendaraan yang ada di wilayah tersebut. Karena keberadaan kendaraan selama ini berbeda di wilayah Kecamatan.

7. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam rangka menjangkau wajib pajak melalui razia gabungan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkala, dengan maksud untuk memperkecil tingkat pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
-, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
-, 2000, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
-, 2000, Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
-, 2001, Tekno Ekonomi Makro, Aksara Baru, Jakarta.
-, 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Dadang Solihin, Drs, MA dan Ir. Putut Marhayudi, MM, MBA, 2002, Panduan Lengkap Otonomi Daerah, Ismee, Jakarta
- J. Supranto, 2001, Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk

- Menaikkan Pangsa Pasar, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1998, Metode Penelitian Masyarakat, Penerbit PT. Gramedia Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan Kedelapanbelas, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marsono, 2001, Administrasi Perkantoran Modern, Edisi I, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mardiasmo, Dr, MBA, AK, 2002, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta
- Mudrajat Kuncoro, 2003, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Erlangga, Jakarta.
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, 1999, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, Cetakan Ketiga, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, CV. Alfabeta, Bandung, cetakan VIII.
- Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan Keduabelas, Edisi Revisi V, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 2000, Metodelogi Research, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yokyakarta.
- The Liang Gie, 2001, Kamus Administrasi, Gunung Agung, Jakarta.
- Winarno Surachmat, 1999, Dasar-dasar Teknik Research, BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.